



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BEKASI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DPRD

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LIA ERLIANI
2. Jabatan : SEKRETARIS DPRD
3. NHK : 421131

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.948.000.000
1. Tanah Seluas 1.200 m ² di KAB / KOTA KUNINGAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 840.000.000		
2. Tanah Seluas 4.000 m ² di KAB / KOTA KUNINGAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 480.000.000		
3. Tanah Seluas 420 m ² di KAB / KOTA KUNINGAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 378.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m ² /260 m ² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.250.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	669.000.000
1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT DAKKAR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000		
2. MOTOR, KAWASAKI VERSI 250CC Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 42.000.000		
3. MOBIL, TOYOTA RAIZE 1.0 OTG SPORT CVT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 252.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	307.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	85.140.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	4.009.640.000

**III. HUTANG****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.

4.009.640.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BEKASI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DPRD

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ZALALUDIN
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN
3. NHK : 422160

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	3.000.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 156 m ² /100 m ² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 156 m ² /120 m ² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	322.000.000
1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 11.500.000		
3. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA2,4 G Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 235.000.000		
4. MOTOR, KAWASAKI SEPEDA MOTOR Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 70.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	10.700.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	42.968.857
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	3.375.668.857
III. HUTANG	Rp.	1.198.022.915
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.177.645.942



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BEKASI

UNIT KERJA : SEKRETARIAT DPRD

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ALI SYOFYAN
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN
3. NHK : 417362

II. DATA HARTA

	Rp.	
A. TANAH DAN BANGUNAN	3.150.000.000	
1. Tanah dan Bangunan Seluas 394 m ² /250 m ² di KAB / KOTA BEKASI, Rp. 1.100.000.000		
2. Tanah Seluas 260 m ² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m ² /60 m ² di KAB / KOTA BEKASI, Rp. 400.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 386 m ² /160 m ² di KAB / KOTA KOTA BEKASI , Rp. 1.000.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	214.000.000	
1. MOBIL, NISSAN MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000		
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
3. MOTOR, KAWASAKI VERSYS 650 Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 92.000.000		
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 32.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	1.000.000.000	
D. SURAT BERHARGA	547.438.634	
E. KAS DAN SETARA KAS	1.256.028.560	

**F. HARTA LAINNYA**

Sub Total

Rp.

6.167.467.194

III. HUTANG

Rp.

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

6.167.467.194

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpн.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpн.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila di kemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BEKASI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DPRD

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ASTI RISWIWAYANTI
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN
3. NHK : 421262

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	---
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	---
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.608.210
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	4.608.210
III. HUTANG	Rp.	700.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	-695.391.790

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BEKASI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DPRD

I. DATA PRIBADI

1. Nama : H. AHMAD SAHRONI
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN
3. NHK : 422058

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.903.600.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m ² /150 m ² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 457.000.000		
2. Tanah Seluas 970 m ² di KAB / KOTA BEKASI, HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.446.600.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	142.000.000
1. MOTOR, HONDA MATIK Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000		
3. MOBIL, DAIHATSU TERIOS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	8.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	2.053.600.000
III. HUTANG	Rp.	10.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.043.600.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.